



PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA ATAS PENETAPAN UMK KEWILAYAHAN

Rahmat Al Hakim

Dosen, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, rahmatalhakim2@gmail.com

Article History:

Submitted

15 Juni 2022

Received

25 Juni 2022

Revised

28 Juli 2022

Accepted

13 Agustus 2022

Abstact

Determination of District Minimum Wage in Cilacap Regency is different from 35 regencies / cities in Central Java which aims to stimulate investment from private parties and even distribution of development in all regions in Cilacap Regency, the basis of this research. The variables used are determination of Regency Minimum Wage, Population Growth and Industrial Sector Contribution to GRDP, Inequality of Inter-Area Income and Labor Force Participation Rate in Cilacap Regency Central Java Province 2008-2015. The data used is secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) Cilacap Regency analyzed using panel data regression. The results showed that: Determination of District Minimum Wage, Population Growth and Industrial Growth have positive and significant impact to Gross Regional Domestic Product (GRDP). Regency Minimum Wage has an non-significant effect on income inequality between regions, while population growth and industrial sector growth have a significant effect on income inequality among regions, for variable of population growth have positive effect, while industry sector have negative effect. Regency Minimum Wage has positive (non-significant) influence on labor force participation rate, while population growth and industrial sector growth have significant effect to income inequality among region, for variable of population growth have negative effect while industry sector have positive effect.

Keywords: Regency Minimum Wages, Regional Inequality

Abstrak

Penetapan UMK Kewilayahan di Kabupaten Cilacap berbeda dengan 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bertujuan untuk merangsang investasi dari pihak swasta dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Kabupaten Cilacap, menjadi dasar penelitian ini. Variabel yang digunakan adalah penetapan UMK Kewilayahan, Pertumbuhan Penduduk

dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penetapan UMK Kewilayahan, Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Sektor Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). UMK Kewilayahan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah sedangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, untuk variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, sementara sektor industri berpengaruh negatif. UMK Kewilayahan berpengaruh positif (tidak signifikan) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, untuk variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif sementara sektor industri berpengaruh positif.

Kata kunci: UMK Kewilayahan, Ketimpangan Pendapatan

A. Pendahuluan

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effects*) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunannya. Dengan keyakinan tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai terutama Jawa. Selain itu pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Suryono (2000, hal. 5) menyatakan bahwa pembangunan

ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang membagi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 membagi kewenangan urusan pemerintah daerah menjadi ; urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan undang-undang tersebut, permasalahan ketenagakerjaan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah yang mengatur berbagai hal tentang hak dan kewajiban tenaga kerja pada suatu daerah tertentu salah satunya adalah penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengatur tentang upah minimum.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cilacap berbeda dengan 34 Kabupaten/ Kota lain di wilayah propinsi Jawa Tengah, pada 34 kabupaten/ kota di propinsi Jawa Tengah penetapan UMK menggunakan penetapan UMK tunggal sedangkan di Kabupaten Cilacap penetapan UMK berdasarkan wilayah yaitu: UMK Wilayah Cilacap Timur, Cilacap Kota dan Cilacap Barat. Penetapan UMK tersebut tidak terlepas dari kondisi Kabupaten Cilacap yang memiliki luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Cilacap cukup kompleks dengan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) dan variasi sektor usaha pada masing-masing wilayah sebagai dasar penetapan UMK seperti tersaji pada Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1
Daftar Upah Minimum pada 35 (Tiga puluh lima)
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

No	KABUPATEN/ KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2016
1.	Kota Semarang	Rp. 1.909.000,-
2.	Kabupaten Demak	Rp. 1.745.000,-
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 1.639.600,-
4.	Kabupaten Semarang	Rp. 1.610.000,-
5.	Kota Salatiga	Rp. 1.450.953,-
6.	Kabupaten Grobogan	Rp. 1.305.000,-
7.	Kabupaten Blora	Rp. 1.328.500,-
8.	Kabupaten Kudus	Rp. 1.608.200,-
9.	Kabupaten Jepara	Rp. 1.350.000,-
10.	Kabupaten Pati	Rp. 1.310.000,-
11.	Kabupaten Rembang	Rp. 1.500.000,-
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 1.403.500,-
13.	Kota Surakarta	Rp. 1.418.000,-
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 1.396.000,-
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 1.300.000,-
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 1.420.000,-
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 1.293.000,-
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 1.400.000,-
19.	Kota Magelang	Rp. 1.341.000,-
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 1.410.000,-
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 1.300.000,-
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 1.313.000,-
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 1.326.000,-
24.	Kabupaten Kebumen	Rp. 1.324.600,-
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 1.350.000,-
26.	Kabupaten Cilacap	
	Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 1.608.000,-
	– Kecamatan Cilacap Utara	
	– Kecamatan Cilacap Tengah	
	– Kecamatan Cilacap Selatan	
	Wilayah Timur, meliputi :	Rp. 1.490.000,-
	– Kecamatan Kesugihan	
	– Kecamatan Maos	
	– Kecamatan Sampang	
	– Kecamatan Binangun	
	– Kecamatan Nusawungu	
	– Kecamatan Kroya	
	– Kecamatan Adipala	
	Wilayah Barat, meliputi	Rp. 1.483.000,-

	– Kecamatan Jeruklegi	
	– Kecamatan Kawunganten	
	– Kecamatan Bantarsari	
	– Kecamatan Gandrungmangu	
	– Kecamatan Sidareja	
	– Kecamatan Cipari	
	– Kecamatan Kedungreja	
	– Kecamatan Patimuan	
	– Kecamatan Karangpucung	
	– Kecamatan Cimanggu	
	– Kecamatan Majenang	
	– Kecamatan Wanareja	
	– Kecamatan Dayeuhluhur	
	– Kecamatan Kampunglaut	
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 1.265.000,-
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 1.377.500,-
29.	Kabupaten Batang	Rp. 1.467.500,-
30.	Kota Pekalongan	Rp. 1.500.000,-
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 1.463.000,-
32.	Kabupaten PemaLang	Rp. 1.325.000,-
33.	Kota Tegal	Rp. 1.385.000,-
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 1.373.000,-
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 1.310.000,-

Sumber: Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 560/ 66 Tahun 2015 tentang Upah minimum pada 35 (Tiga puluh lima) Kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah

B. Metodologi

Metode Penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif untuk mendiskripsikan tentang pertumbuhan ekonomi sektoral, Ketimpangan distribusi pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan disejumlah kecamatan, kontribusi dari tiap-tiap serta penetapan kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) berdasar wilayah di Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah. Analisis kuantitatif secara statistik digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel Pertumbuhan Penduduk, UMK, Kontribusi output sektor industri terhadap Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan distribusi pendapatan dan Tingkat Angka Partisipasi Kerja.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui media perantara berupa laporan historis yang tersusundalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan yang diperoleh dari objek penelitian (Sulistyanto dan Susilawati). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Biro Pusat Statistik (BPS)

berupa data Time Series Periode 2008-2015. Defenisi operasional dari variabel sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan antar wilayah adalah ketidakmerataan pendapatan disejumlah kecamatan di Kabupaten Cilacap yang di ukur dengan indeks Williamson selama tahun 2008 s/d 2015
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.
3. Pertumbuhan Penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Cilacap selama tahun 2008 s/d 2015, yang berusia produktif 15 - 55 tahun yang diukur dalam juta jiwa.
4. Upah minimum kabupaten (UMK) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap yang disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk tenaga kerja dari tahun 2008 s/d 2015 yang dinyatakan dalam rupiah, kemudian untuk mengetahui upah riil yang akan dianalisis lebih lanjut maka UMK akan dikonversi menggunakan indeks harga konsumen pada tahun yang bersangkutan.
5. Kontribusi sektor industri adalah jumlah nilai hasil produksi industri dari tahun 2008 s/d 2015 terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap yang dinyatakan dalam rupiah.
6. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja adalah jumlah orang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dari tahun 2008 s/d 2015 di Kabupaten Cilacap dan dinyatakan dalam prosentase.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{1it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}) \quad (3.1)$$

$$Y_{2it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}) \quad (3.2)$$

$$Y_{3it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}) \quad (3.3)$$

Dimana :

Y_1 = Pertumbuhan ekonomi

Y_2 = Ketimpangan pendapatan antar wilayah

Y_3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

X_1 = UMK

X_2 = Pertumbuhan Penduduk

X_3 = Kontribusi output industri

i = nilai spasial (Wilayah Cilacap Timur, Wilayah Cilacap Kota dan Wilayah Cilacap Barat)

t = series dari tahun 2008 sampai dengan 2016

C. Hasil Penelitian

1. Analisa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengujian *Langrangge Multiplier* merujuk pada penggunaan *Random Effect Model* sebagai model terbaik untuk mengestimasi data, sehingga model estimasi *Random Effect* tersebut yang digunakan sebagai estimator.

Tabel 2
Hasil Estimasi Model *Random Effect* untuk variabel PDRB

Variabel	Koefisien	t- Statistik	P. Value
UMK	0.26	10.34	0.00
Pert. Penduduk	0.47	3.13	0.00
Sekt. Industri	0.20	0.03	0.00
Weighted Statistics			
R-squared	0.73		
Adjusted R-squared	0.73		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.80		
Sum squared resid	17.03		

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil estimasi model di atas menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), Pertumbuhan Penduduk (PENDUDUK) dan Sektor Industri (INDUSTRI) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap, pada tingkat signifikansi α 5 persen.

2. Analisa Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Estimasi penentuan model secara konsisten menunjuk pada *Fixed Effect Model* maka model ini yang digunakan sebagai estimator

Tabel 3Hasil Estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* untuk variabel IW

Variabel	Koefisien	t- Statistik	P. Value
UMK	-0.00	-0.77	0.44
Pert. Penduduk	0.07	2.58	0.01
Sekt.Industri	-0.01	-4.23	0.00
Weighted Statistics			
R-squared	0.99		
Adjusted R-squared	0.99		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.96		
Sum squared resid	0.02		

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, uji parsial dengan melihat nilai probabilitas p-value untuk variable independen UMK lebih besar dari α 5 persen ($\alpha = 0.05$) dan untuk variable PENDUDUK dan SEKTOR INDUSTRI lebih kecil dari nilai α 5 persen ($\alpha = 0.05$). Oleh karena itu, pada tingkat keyakinan 95 persen data yang ada mendukung bahwa variable independen yang meliputi PENDUDUK, SEKTOR INDUSTRI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IW sedangkan untuk variabel UMK tidak berpengaruh secara signifikan, di Kabupaten Cilacap.

3. Analisa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Hasil kedua pengujian model secara konsisten menunjuk pada *Fixed Effect Model* maka model ini yang digunakan sebagai estimator.

Tabel 4Hasil Estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* untuk variabel TPAK

Variabel	Koefisien	t- Statistik	P. Value
UMK	0.02	1,06	0.44
Pert. Penduduk	-0.73	-2.55	0.01
Sekt.Industri	0.09	4.18	0.00
Weighted Statistics			
R-squared	0.88		
Adjusted R-squared	0.86		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.79		
Sum squared resid	1.59		

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil estimasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa uji parsial dengan melihat nilai probabilitas p-value untuk variable independen UMK lebih besar dari α 5 persen ($\alpha = 0.05$) dan untuk variable PENDUDUK DAN SEKTOR INDUSTRI lebih kecil dari nilai α 5 persen ($\alpha = 0.05$). Oleh karena itu, pada tingkat keyakinan 95 persen data yang ada

mendukung bahwa variable independen yang meliputi PENDUDUK, SEKTOR INDUSTRI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap TPAK sedangkan untuk variabel UMK tidak berpengaruh secara signifikan, di Kabupaten Cilacap.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan UMK Kewilayahan, Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Sektor Industri berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2015.
2. Penetapan UMK Kewilayahan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2015. Sedangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan pengaruh positif untuk variabel pertumbuhan penduduk sementara sektor industri memiliki pengaruh yang bernilai negatif.
3. Penetapan UMK Kewilayahan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Cilacap. Sedangkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dengan pengaruh negatif untuk variabel pertumbuhan penduduk sementara sektor industri memiliki pengaruh yang bernilai positif.

E. Implikasi

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi antara lain:

1. Penetapan UMK dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sektor industri, pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Investasi sektor industri dititik beratkan pada industri yang menggunakan sumberdaya lokal (sumberdaya manusia) yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Cilacap.

3. Penetapan UMK tunggal di Kabupaten Cilacap yang mulai berlaku tahun 2017 sejalan dengan hasil penelitian bahwa UMK Kewilayahan berpengaruh tidak signifikan terhadap upaya pemerataan pendapatan antar wilayah dan mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), sehingga implementasi kebijakan ini perlu diterapkan secara konsisten sehingga dilaksanakan oleh semua sektor usaha yang ada guna mewujudkan kondusifitas perekonomian di Kabupaten Cilacap.

Daftar Pustaka

- Adrian Coto, 2006, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Output Sektor Industri, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia*, UI, Jakarta
- Ahluwalia, M. S., Chenery, H., Bell, C. L. G., Duloy, J. H., and Jolly, R. 1974, *Redistribution with Growth*, Oxford: Oxford University Press
- Biro Pusat Statistik, 2005, *PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2000-2004*, Semarang
- Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*: Padang: Unand
- Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan, 2008, *Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta.
- Gujarati, D., N., 2003, *Basic Econometric*, Mc-Graw Hill, New York.
- Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah. Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV*. Jakarta
- Hariadi, dkk. 2008, *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.13 Issue 2. UII
- Ikhsan, Moh, 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi, Edisi 2*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Iskandar, N: 1974, *Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia, Special Reprint series No.4, demographic Institute FEUI Jakarta, January 1974, p.19.*, FEUI Jakarta.
- Joko Waluyo. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. JEL
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1994, *Indonesia Country Report Population and Development*, Jakarta, Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nangarumba, Muara. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014 JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015*. ISSN 2086-1575
- Pangemanan, Lyndon, 2001. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 1980 -1996. Tesis*. Universitas Indonesia.
- Rasydi, Anwar. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Retnosari, Devi. 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat. Skripsi*. IPB
- Ridwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta.

-
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: *Prisma Vol. 3* Maret 1997.
- Subekti, Adji. 2011. *Dinamika Inflasi Indonesia pada Tataran Provinsi*. Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6*. No.1, 2001.
- Suryana, 2000. *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan*